

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KARTU KELUARGA
SEJAHTERA DALAM UPAYA MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA
NAGASARIBU I KECAMATAN LINTONGNIHUTA
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
PROVINSI SUMATERA UTARA**

SKRIPSI

OLEH :

HARRYS SIMON NABABAN

198520102



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 18/9/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)18/9/23

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KARTU KELUARGA
SEJAHTERA DALAM UPAYA MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA
NAGASARIBU I KECAMATAN LINTONGNIHUTA
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
PROVINSI SUMATERA UTARA**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Medan Area

OLEH :

HARRYS SIMON NABABAN

198520102

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 18/9/23

Access From (repository.uma.ac.id)18/9/23

LEMBAR PENGESAHAN

JUDUL : Implementasi Kebijakan Program Kartu Keluarga Sejahtera dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Nagasaribu I Kecamatan Lintongnihuta Kabupaten Humbang Hasundutan

NAMA : HARRY S SIMON NABABAN

NPM : 198520102

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK



Pembimbing I

Drs. Bahrum Jamil, MAP

Pembimbing II

Marlina Deliana, SAB, MAB

Mengetahui :

Dekan Fakultas ISIPOL

Dr. Effiati Juliana Hasibuan, MSi

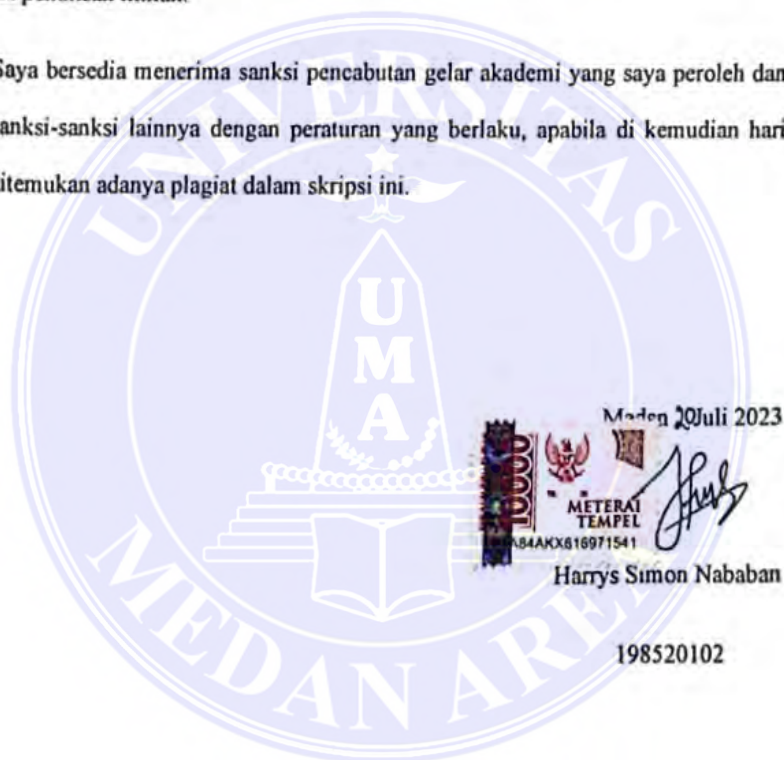
Ka Prodi Administrasi Publik

Khairunnisah Lubis, S.Scs, M.I.Pol

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademi yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Harrys Simon Nababan

NPM : 198520102

Program Studi : Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : Implementasi Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Nagasaribu I Kecamatan Lintongnihuta Kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada tanggal: 20 Juli 2023

Yang menyatakan



(Harrys Simon Nababan)

ABSTRAK

Program Kartu Keluarga Sejahtera merupakan salah satu Program yang ditujukan pemerintah kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang telah dilakukan di Desa Nagasaribu I Kecamatan Lintongnihuta Kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara dan untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam pengimplementasian program Kartu Keluarga Sejahtera. Adapun teori yang digunakan adalah teori Implementasi dari Van Meter dan Van Horn yang memiliki enam indikator, yaitu Standar dan sasaran Kebijakan/ ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi antar organisasi, disposisi atau sikap pelaksana dan lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Adapun penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Program Kartu Keluarga Sejahtera di Desa Nagasaribu I Kecamatan Lintongnihuta Kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara sudah terealisasikan dengan baik namun ada satu indikator yang belum dapat direalisasikan secara tepat yaitu komunikasi antar organisasi dan. Terdapat beberapa faktor penghambat dalam implementasi kartu keluarga sejahtera ini yaitu, keterlambatan dalam penyaluran KKS yang tidak ada konfirmasi dari pusat

Kata kunci : implementasi, program, kesejahteraan masyarakat

ABSTRACT

The Prosperous Family Card Program is one of the programs aimed by the government for low-income people. The theory used is the theory of Implementation from Van Meter and Van Horn which has six indicators. The research method used is descriptive method with a qualitative approach. Data collection techniques used are observation, interviews and documentation. Data analysis techniques used are data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. There are several inhibiting factors in the implementation of this prosperous family card, namely, delays in distribution of KKS without confirmation from the center.

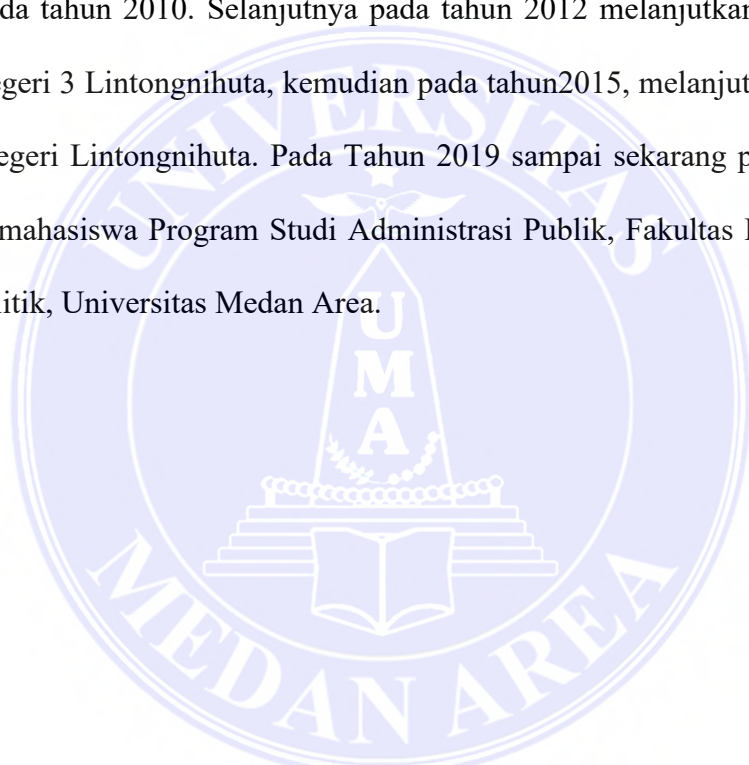
Keywords : implementation, program, public welfare



RIWAYAT HIDUP

Penulis Bernama lengkap Harrys Simon Nababan, anak dari Anhyonyus Nababan dan Rusmida Situmorang. Lahir pada 19 Maret 2000 di Garut. Penulis meruakan anak kedua dari dua bersaudara.

Penulis bersekolah di Sekolah Dasar Kristen Dharma Bhakti, Garut Kota, Kabupaten Garut, dan pindah pada kelas 5 SD ke Sekolah Dasar 174535 Sitonggi-tonggi ada tahun 2010. Selanjutnya pada tahun 2012 melanjutkan Pendidikan di SMP Negeri 3 Lintongnihuta, kemudian pada tahun 2015, melanjutkan Pendidikan SMA Negeri Lintongnihuta. Pada Tahun 2019 sampai sekarang penulis terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Medan Area.



KATA PENGANTAR

Puji Syukur saya ucapkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan hikmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini berhasil diselesaikan. Tema yang dipilih dalam penelitian ini adalah Program Kartu Keluarga Sejahtera dengan judul Implementasi Kebijakan Program Kartu Keluarga Sejahtera Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Nagasaribu I Kecamatan Lintongnihuta Kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan S-1 Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area. Penulis menyadari dalam menyelesaikan skripsi ini, telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terimakasih yang tak terhingga terhadap :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area
2. Ibu Dr. Effiati Juliana Hasibuan, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Medan Area.
3. Ibu Khairunnisah Lubis, S.Sos, M.I.Pol selaku Ketua Program Studi Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
4. Bapak Drs. Bahrum Jamil, M.AP selaku Dosen Pembimbing I yang membimbing penulis dalam penulisan Skripsi ini.
5. Ibu Marlina Deliana, S. AB, M.AB selaku Dosen Pembimbing II yang membimbing penulis dalam penulisan Skripsi ini.

6. Ibu Dra. Nurhayati Harahap, M.AP selaku Sekretaris dalam membimbing penulisan Skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen pengajar dan Staf administrasi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat selama penulis mengikuti perkuliahan.
8. Terkhusus kepada kedua orangtua tercinta yang sudah membesarkan dan mendidik saya dengan penuh kasih sayang dan senantiasa memberi dukungan, motivasi dan doa serta materi yang selalu diusahakan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada abang saya Goratua Indra Guntara Nababan yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis
10. Keluarga lainnya yang selalu memberikan dukungan dan doa kepada peneliti demi selesainya skripsi ini
11. Kepala Desa Nagasaribu I yang berkenan mengantar penulis untuk bertemu langsung dengan Dinas Perkim sekaligus sebagai infoman penelitian

12. Sekretaris Desa Nagasaribu I yang berkenan membantu peneliti dalam mengumpulkan data-data dan dokumen terkait penelitian ini
13. Semua masyarakat yang telah membantu peneliti memberikan data dan informasi terkait dengan penelitian ini
14. Seluruh teman-teman seperjuangan Mahasiswa Administrasi Publik yang selalu memberikan semangat dan doanya.



Medan, Mei 2023

Penulis,

Harrys Simon Nababan

198520102

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| ABSTRAK | iii |
| ABSTRACT | v |
| RIWAYAT HIDUP | vi |
| KATA PENGANTAR..... | vii |
| DAFTAR ISI..... | x |
| DAFTAR GAMBAR..... | xii |
| DAFTAR TABEL | xiii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 4 |
| 1.3 Tujuan Penelitian..... | 4 |
| 1.4 Manfaat Penelitian..... | 5 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 24 |
| 2.1 Kebijakan Publik | 24 |
| 2.1.1 Pengertian Kebijakan Publik | 24 |
| 2.1.2 Unsur-unsur Kebijakan Publik | 25 |
| 2.1.3 Karakteristik Kebijakan Publik..... | 27 |
| 2.2 Implementasi Kebijakan | 27 |
| 2.2.1 Pengertian Implementasi Kebijakan | 27 |
| 2.2.2 Faktor Pendukung Implementasi kebijakan..... | 35 |
| 2.3 Kartu Keluarga Sejahtera | 36 |
| 2.3.1 Tujuan Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)..... | 37 |
| 2.3.2 Manfaat Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)..... | 37 |
| 2.3.3 Dasar Hukum Pelaksanaan Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)..... | 37 |
| 2.3.4 Kriteria Program Kartu Keluarga Sejahtera..... | 38 |
| 2.4 Penelitian Terdahulu..... | 39 |
| 2.5 Kerangka Berpikir | 43 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 44 |
| 3.1 Jenis Penelitian | 44 |
| 3.2 Lokasi Penelitian | 44 |
| 3.3 Waktu Penelitian | 45 |
| 3.4 Sumber Data | 45 |
| 3.5 Teknik Pengumpulan Data | 46 |

| | |
|---|-----------|
| 3.6 Teknik Analisis Data | 48 |
| BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN | 50 |
| 4.1 Hasil penelitian..... | 50 |
| 4.1.1 Deskripsi Umum Lokasi Penelitian | 50 |
| 4.1.2 Struktur Pemerintahan Desa Nagasaribu I..... | 53 |
| 4.1.3 Tugas Pokok Pemerintah Desa Nagasaribu I..... | 54 |
| 4.1.4 Visi dan Misi Desa Nagasaribu I..... | 59 |
| 4.2 Pembahasan | 60 |
| 4.2.1 Implementasi Kebijakan Program Kartu Keluarga Sejahtera di Desa Nagasaribu I Kecamatan Lintongnihuta Kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara | 60 |
| 4.3 Dampak Pengimplementasian Program Kartu Keluarga Sejahtera di Desa Nagasaribu I | 73 |
| 4.4 Faktor penghambat Implementasi Program Kartu Keluarga Sejahtera Di Desa Nagasaribu I | 74 |
| BAB V KESIMPULAN DAN SARAN | 79 |
| 5.1 Kesimpulan..... | 79 |
| 5.2 Saran | 80 |
| DAFTAR PUSTAKA | 81 |
| LAMPIRAN..... | 80 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|----|
| Gambar 2.1 kerangka berpikir..... | 43 |
| Gambar 4.1 Struktur Pemerintahan Desa Nagasaribu I | 53 |



DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Table 2.1 Penelitian Terdahulu | 35 |
| Tabel 3.1 Waktu Penelitian | 45 |
| Table 4.1 Batas Wilayah | 50 |
| Table 4.2 Jumlah Penduduk Desa Nagasaribu I | 51 |
| Tabel 4.3 Sarana dan Prasarana Desa Nagasaribu I..... | 52 |
| Tabel 4.4 Sumber Daya Desa Nagasaribu I | 64 |



DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|--------------------------|----|
| Lampiran Wawancara | 83 |
| Lampiran Gambar | 84 |



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang dialami oleh individu, dimana individu tersebut tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kemiskinan juga dapat dicirikan dengan keterbatasan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar yang meliputi pangan, tempat tinggal, pakaian dimana hal ini sangat berkaitan erat dengan kualitas hidup. Kemiskinan yang terjadi di Indonesia sudah menjadi masalah sosial yang senantiasa relevan untuk dikaji terus menerus. Kemiskinan merupakan masalah yang tidak seorang pun yang menginginkannya untuk hadir dalam hidupnya bahkan negara manapun tak ada yang menginginkan untuk hadirnya kemiskinan, namun masalah kemiskinan telah ada sejak lama dan sampai sekarang masih hadir di tengah-tengah kita saat ini.

Pada era pemerintahan Presiden Jokowi, salah satu program baru maupun kebijakan baru yang diluncurkan dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengembangan sistem jaminan sosial yaitu adanya Program Kartu Sakti sebagaimana diatur dalam Inpres No. 7 Tahun 2014. Program Kartu Sakti yang diluncurkan oleh pemerintahan Joko Widodo yang diperuntukkan untuk masyarakat Indonesia yang kurang mampu maupun masyarakat menengah ke bawah. Kartu sakti yang dikeluarkan pemerintah meliputi tiga kartu yaitu Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Ketiga kartu yang tergabung dalam Government to Person Program (G2P) tersebut adalah bantuan bagi keluarga kurang mampu seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Langsung

Sementara Masyarakat (BLSM), yang dulunya diberikan secara non tunai melalui Layanan Keuangan Digital melalui kartu.

KKS adalah salah satu program baru yang diluncurkan presiden Jokowi yang diberikan dalam paket kompensasi yang diajukan pemerintah untuk membantu Rumah Tangga Sangat Miskin dan Rentan yang terkena dampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) agar mereka yang hidup didalam garis kemiskinan dapat terbantu dalam menghadapi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut. Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) ini bertujuan untuk mengurangi masalah kemiskinan dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 541/3150/SJ tentang pelaksanaan dan pembagian Kartu Simpanan Keluarga Sejahtera sebagai pengganti program Kartu Perlindungan Sosial (KPS) dari APBN-P 2014.

Program KKS di latarbelakangi oleh adanya permasalahan utama pembangunan yaitu masih besarnya jumlah penduduk miskin serta rendahnya kualitas SDM. KKS adalah asistensi sosial kepada Keluarga Sangat Miskin (KSM) yang memenuhi kualifikasi tertentu dengan memberlakukan persyaratan tertentu yang dapat mengubah perilaku individu maupun masyarakat KKS sebagai perlindungan sosial merupakan upaya dalam mengangkat tingkat kesejahteraan masyarakat yang tidak memiliki kekuatan, sehingga diperlukan penguatan atau pemberdayaan agar warga tersebut memiliki daya untuk keluar dari lingkaran kemiskinan.

Kartu keluarga sejahtera (KKS) di salurkan di Kabupaten Humbang untuk merespon permasalahan yang ada, seperti yang terdapat di Desa Nagasaribu I. Dengan adanya program kartu keluarga sejahtera (KKS) ini, diharapkan dapat

memberikan kesempatan kepada masyarakat miskin yang ada di Kabupaten Humbang Hasundutan khususnya yang ada di Desa Nagasaribu I untuk ikut berperan serta terhadap program KKS yang nantinya akan memberikan dampak yang logis bagi kehidupan mereka terutama pada peningkatan kualitas hidup melalui perekonomian yang nantinya diharapkan dapat menanggulangi kemiskinan yang selama ini menjerat masyarakat Desa Nagasaribu I. Pada tahun 2019, program ini mulai disalurkan di desa Nagasaribu I. Berdasarkan dari salah satu tujuan dari program KKS adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi semenjak program KKS ini di jalankan, perekonomian masyarakat di desa Nagasaribu I Kecamatan Lintongnihuta tidak ada peningkatan.

Dari pembahasan di atas peneliti tertarik untuk membahas mengenai pengimplementasian program KKS. Oleh karena itu peneliti mengangkat judul **“Implementasi Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Nagasaribu I Kecamatan Lintongnihuta Kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian yaitu :

1. Bagaimana implementasi Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang telah dilakukan Pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat di Desa Nagasaribu I Kecamatan Lintongnihuta Kabupaten Humbang Hasundutan?
2. Apa yang menjadi faktor penghambat dalam pengimplementasi Program Kartu Keluarga Masyarakat di Desa Nagasaribu I Kecamatan Lintongnihuta Kabupaten Humbang Hasundutan?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk menghasilkan hasil yang sempurna dari penelitian terkait implementasi program kartu keluarga sejahtera di desa Nagasaribu I Kecamatan Lintongnihuta Kabupaten Humbang Hasundutan, terbentuklah tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yaitu :

1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan program kartu keluarga sejahtera yang telah dilakukan Pemerintah dalam mensejahterakan kehidupan masyarakat.
2. Untuk meninjau faktor penghambat dalam pelaksanaan program kartu keluarga sejahtera yang telah dilakukan Pemerintah dalam mensejahterakan kehidupan masyarakat.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

- a) Hasil dari penelitian Sebagai bahan pembelajaran terhadap proses pengimplementasian kebijakan program kartu keluarga sejahtera (KKS).
- b) Sebagai bahan pengembangan terhadap penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan implementasi program kartu keluarga sejahtera.

2. Secara Praktis

a) Bagi Penulis

Dapat menambah pembelajaran tentang tujuan program kartu keluarga sejahtera dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Bagi Pemerintah Daerah

- b) Sebagai bahan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan implementasi program kartu keluarga sejahtera.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kebijakan Publik

2.1.1 Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan (*policy*) umumnya digunakan untuk memilih dan menunjukkan pilihan terpenting untuk mempercepat kehidupan, baik dalam kehidupan organisasi pemerintahan maupun privat. Kebijakan harus bebas dari konotasi atau nuansa yang dicakup dalam kata politis (*political*), yang sering diyakini mengandung makna keberpihakan akibat adanya kepentingan.

Kebijakan publik dilihat dari kamus administrasi publik Chandler dan Plano dalam Pasolong (2016) ialah “ mengatakan bahwa kebijakan publik adalah 12 pemanfaatan yang strategis terhadap sumber-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik atau pemerintah”. Sedangkan, Nasucha dalam Pasolong (2016) ialah “ mengatakan bahwa kebijakan publik adalah kewenangan pemerintah dalam pembuatan suatu kebijakan yang digunakan ke dalam perangkat peraturan hukum”

Thomas R. Dye dalam Pasolong (2010) memberikan defenisi kebijakan publik secara luas, yakni sebagai “whatever governments choose to do or not to do”. Menurut Dye, apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu tentu ada tujuannya karena kebijakn publik merupakan “tindakan” pemerintah Apabila pemerintah memilih untuk tidak melakukan sesuatu, juga merupakan kebijakan publik yang ada tujuannya. Menurut James E Anderson sebagaimana disunting Budi Winarno (2008) memberikan definisi tentang kebijakan publik sebagai kebijakan-kebijakan yang dibangun oleh badan-badan dan pejabat-pejabat

pemerintah, di mana implikasi dari kebijakan tersebut adalah: 1) kebijakan publik selalu mempunyai tujuan tertentu atau mempunyai tindakan-tindakan yang berorientasi pada tujuan; 2) kebijakan publik berisi tindakan-tindakan pemerintah; 3) kebijakan publik merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang masih dimaksudkan untuk dilakukan; 4) kebijakan publik yang diambil bisa bersifat positif dalam arti merupakan tindakan pemerintah mengenai segala sesuatu masalah tertentu, atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu; 5) kebijakan pemerintah setidak-tidaknya dalam arti yang positif didasarkan pada peraturan perundangan yang bersifat mengikat dan memaksa.

Berdasarkan beberapa pandangan para ahli tersebut, pada hakikatnya kebijakan publik dibuat oleh pemerintah berupa tindakan-tindakan pemerintah. Kebijakan publik, baik untuk melakukan maupun tidak melakukan sesuatu mempunyai tujuan tertentu. Kebijakan publik ditujukan untuk kepentingan masyarakat.

2.1.2 Unsur-unsur Kebijakan Publik

Kebijakan publik pada dasarnya sebagai sistem dan proses mempunyai elemen atau unsur kebijakan yang saling berhubungan, mempengaruhi, menunjang serta ketergantungan secara timbal balik untuk mencapai tujuan kebijakan publik.

Dalam sistem kebijakan publik selain terdapat elemen atau unsur kebijakan publik terdapat elemen atau unsur kebijakan publik terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi proses kebijakan publik. Menurut Mustopadidjaya

(2003) terdapat empat faktor dinamik yang merupakan unsur dari sistem kebijakan publik yang berperan dalam proses kebijakan yaitu :

1. **Lingkungan kebijakan** yaitu keadaan yang melatar belakangi atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya isu kebijakan yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh para pelaku kebijakan dan oleh suatu kebijakan.
2. **Pembuat dan pelaku kebijakan**, orang atau sekelompok orang atau organisasi yang mempunyai peranan tertentu dalam proses kebijakan, karena mereka dalam posisi menentukan atau mempengaruhi baik dalam formulasi kebijakan ataupun dalam tahapan implementasi, pengawasan serta evaluasi kebijakan serta hasilnya yang dicapai dalam perkembangan kebijakan tersebut.
3. **Kebijakan itu sendiri** yaitu keputusan atau ketetapan dari sejumlah pilihan yang berhubungan satu sama lain dengan mempunyai tujuan dan sasaran tertentu.
4. **Kelompok sasaran kebijakan** yaitu orang atau sekelompok orang atau organisasi dalam lingkungan masyarakat yang berperilaku atau keadaannya ingin dipengaruhi oleh kebijakan yang bersangkutan. Salah satu contohnya kelompok sasaran kebijakan dalam program Kartu Keluarga Sejahtera terhadap kelompok sasaran masyarakat miskin pedesaan dan perkotaan.

2.1.3 Karakteristik Kebijakan Publik

Secara umum, kebijakan publik akan menunjukkan karakteristik atau ciri tertentu dari berbagai kegiatan pemerintah. Anderson dalam Abidin (2006) mengemukakan lima ciri umum dari kebijakan publik, yaitu:

- 1 Kebijakan publik adalah perilaku yang bertujuan berorientasi pada tujuan daripada perilaku acak atau kebetulan.
- 2 Kebijakan publik terdiri dari rangkaian peraturan, bukan keputusan atau tindakan yang terpisah yang dilakukan oleh pejabat pemerintah.
- 3 Kebijakan disebut sebagai sesuatu hal yang dilakukan pemerintah, bukan apa yang dikatakan akan segera dilakukan.
- 4 Suatu kebijakan dapat bersifat larangan atau dapat berupa pengarahan untuk melaksanakan suatu kebijakan.
- 5 Dimana suatu kebijakan didasarkan pada hukum, karena memiliki kewenangan untuk memaksa masyarakat untuk mematuhi.

2.2 Implementasi Kebijakan

2.2.1 Pengertian Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan. Menurut Mulyadi (2015), "implementasi suatu kebijakan pada dasarnya adalah suatu perubahan atau transformasi yang bersifat multiorganisasi, dimana perubahan yang diterapkan melalui strategi implementasi kebijakan ini mengaitkan berbagai lapisan masyarakat". Implementasi merupakan langkah yang sangat penting dalam proses kebijakan. Banyak kebijakan yang baik yang mampu dibuat oleh pemerintah, tetapi kemudian ternyata tidak mempunyai pengaruh apa-apa dalam kehidupan

negara tersebut karena tidak dilaksanakan. Menurut Wahab (2014) Implementasi adalah proses umum dari tindakan administratif yang dapat diselidiki pada tingkat program tertentu. Menurut Mazmanian (2014) mengemukakan bahwa implementasi adalah pemahaman yang jelas dimana suatu program dinyatakan sebagai aktor atau menjadi fokus perhatian kebijakan yang telah dirumuskan, yaitu fenomena yang muncul setelah disahkannya instruksi kebijakan, yang meliputi upaya administratif serta menimbulkan akibat atau dampak nyata bagi masyarakat. Sama dengan dinyatakan Ripley dan Franklin (dalam Winarno, 2014), implementasi kebijakan adalah apa yang terjadi setelah undang-undang yang telah mengesahkan program, kebijakan dan manfaat nyata.

Implementasi adalah apa yang dilakukan berdasarkan keputusan yang dibuat. Dalam hal ini, terdapat dua pihak yang berperan, yaitu perumus dan pelaksana. Dalam hal ini administrator mengatur cara untuk mengorganisir, mengimplementasikan dan menetapkan kebijakan yang telah diseleksi. Mengorganisir berarti mengatur sumber daya, unit-unit dan metode-metode untuk melaksanakan program. Melakukan interpretasi berkenaan dengan mendefenisikan istilah-istilah program ke dalam rencana-rencana dan petunjuk-petunjuk yang dapat diterima dan *feasible*. Menerapkan berarti menggunakan instrumen-instrumen mengerjakan atau memberikan pelayanan rutin, melakukan pembayaran-pembayaran. Atau dengan kata lain implementasi merupakan tahap realisasi tujuan-tujuan program. Dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah persiapan implementasi, yaitu memikirkan dan menghitung secara matang berbagai kemungkinan keberhasilan dan kegagalan termasuk hambatan atau peluang-peluang yang ada dan kemampuan organisasi

yang disertai tugas melaksanakan program. Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan adalah kegiatan mengimplementasikan kebijakan yang ditujukan kepada kelompok sasaran untuk mewujudkan tujuan kebijakan.

Menurut George Edward III (Agustino, 2012) terdapat 4 faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan antara lain,

yaitu:

a. Komunikasi

Merupakan keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan supaya pelaksana mengetahui maksud tugas yang harus dilaksanakan, artinya yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.

b. Sumberdaya

Apabila pelaksana kekurangan sumberdaya untuk merealisasikan, maka implementasi tidak akan berjalan dengan baik. Sumber daya tersebut biasanya berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.

c. Disposisi

Watak dan kepribadian yang dimiliki oleh pelaksana, misalnya komitmen, jujur, sifat demokratis. Apabila pelaksana memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut bisa melaksanakan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Jika

implementor memiliki sikap atau pandangan yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak berjalan dengan baik.

d. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas menjalankan kebijakan memiliki pengaruh yang sangat penting terhadap pelaksana kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah “Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Sedangkan menurut Van Meter and Van Horn (2002: 100), mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan yang digunakan oleh individu atau kelompok pejabat pemerintah atau swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Adanya 6 model dasar yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn yang membentuk hubungan antara kebijakan dan kinerja. Dalam model ini, variabel yang terikat adalah kinerja yang didefinisikan sebagai sejauh mana standar dan tujuan kebijakan yang direalisasikan.

1 Standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan diukur dari tingkat keberhasilannya dan juga ukuran dan tujuan kebijakan yang sifatnya realistis dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksana kebijakan. Van Meter dan Van Horn dalam buku Subarsono (2011) mengemukakan bahwa untuk mengatur kinerja

implementasi kebijakan tentunya menggunakan standar dan target sasaran tertentu yang wajib untuk dicapai oleh para pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian dalam standar dan sasaran tertentu. Standar dan tujuan kebijakan memiliki hubungan yang erat kaitannya dengan sikap terhadap para pelaksana. Arah sikap (disposisi) para pelaksana terhadap standar dan tujuan kebijakan juga merupakan suatu hal yang penting. Dalam hal standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan ini nanti akan berisikan tentang kemana arah dan tujuan pelaksanaan Program Kartu Keluarga Sejahtera ini. Sasarannya tentunya untuk membuat kehidupan masyarakat lebih sejahtera dan berubah dari kehidupan sebelumnya.

2 Sumber daya

Sumber daya manusia yang berkualitas dan sesuai dengan pekerjaan yang diberikan oleh kebijakan merupakan hal yang wajib dalam setiap tahap implementasi. Manusia merupakan sumber daya yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Hal ini dikarenakan keberhasilan dalam implementasi suatu kebijakan sangat bergantung pada kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia terutama sumber daya manusia. Dalam hal sumber daya ini yang dimaksudkan adalah manusia/masyarakat yang berperan serta dalam pelaksanaan Program Kartu Keluarga Sejahtera tersebut. Sumber daya manusia ini seperti masyarakat penerima bantuan Program Kartu Keluarga Sejahtera yang telah ditetapkan oleh pemerintah Daerah.

3 Karakteristik organisasi pelaksana

Menjadi pusat perhatian lembaga pelaksana, yaitu sebagai organisasi formal dan informal yang akan terlibat dalam implementasi kebijakan. Kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang sangat tepat dan cocok. Karakteristik organisasi pelaksana ini dimaksudkan dengan para pelaksana program dengan memiliki ciri yang sangat tepat dan cocok dalam kinerja implementasi kebijakan.

4 Komunikasi antar organisasi terkait dan suatu kegiatan-kegiatan pelaksanaan

Menurut Van Meter dan Van Horn (2002) agar kebijakan publik dapat dilaksanakan secara efisien maka standar tujuan harus dipahami oleh para individu (*implementors*). Yang akan bertanggung jawab atas pencapaian suatu standard dan tujuan kebijakan, karena itu standard dan tujuan harus diinformasikan pada para pelaksana. Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana dalam kebijakan tentang apa yang menjadi standard dan tujuan yang harus konsisten dan sama dari berbagai sumber informasi. Yang dimaksud dengan komunikasi antar organisasi ini adalah hubungan antara pemerintah daerah dengan masyarakat. Apakah komunikasi diantara pemerintah dengan masyarakat tersebut sudah berjalan dengan lancar sehingga dapat terjalannya program tersebut dengan lancar tanpa halangan.

5 Disposisi atau sikap para pelaksana

Menurut Van Meter dan Van Horn (2002) ,keberhasilan atau kegagalan dalam implementasi kebijakan publik merupakan pengaruh dari sikap penerimaan atau pendekatan dari agen pelaksana kebijakan. Maksud dan

tujuan umum dari suatu standar dan sasaran kebijakan adalah penting. Karena, bagaimanapun juga implementasi kebijakan yang sukses dapat gagal ketika para pelaksana tidak sepenuhnya menyadari standar dan tujuan kebijakan.

Sikap para pelaksana ini sangat penting dalam implementasi kebijakan dimana para pelaksana ini yang akan menentukan dan mengatur jalannya program. Jika sikap para pelaksana sangat menyepelekan kebijakan tersebut maka kebijakan tersebut tidak akan berjalan dengan baik.

6 Lingkungan sosial, ekonomi dan politik

Hal terakhir yang perlu diperhatikan dengan tujuan mengevaluasi kinerja implementasi adalah sejauh mana lingkungan eksternal berkontribusi terhadap keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak mendukung dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan.

Lingkungan sosial, politik, dan ekonomi ini dapat juga menjadi faktor penghambat dan faktor pendukung terjadinya kebijakan. Jika dilihat dari segi lingkungan ekonomi apabila dalam pelaksanaan kebijakan program ini terjadi kekurangan dana maka program tersebut akan terhambat dan lama akan diselesaikan.

Dalam penelitian ini, tentu saja terdapat masalah dalam pelaksanaan kebijakan program Kartu Keluarga Sejahtera. Maka dari itu, peneliti melakukan penelitian secara mendalam terkait masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan program tersebut. Dimana peneliti melakukan wawancara atau observasi langsung kepada informan untuk mendapatkan data di lapangan untuk menjawab dari

tujuan penelitian menggunakan teori Van Meter and Van Horn (2002). Penelitian ini juga mendapatkan faktor-faktor

penghambat dalam implementasi kebijakan program Kartu Keluarga Sejahtera.

Ada pun pendekatan implementasi kebijakan publik menurut Zainal Abidin (2012) yaitu:

1. Pendekatan Struktural

Pendekatan ini melihat peran institusi atau organisasi sebagai sesuatu yang sangat menentukan. Jika organisasi dianggap tidak sesuai dengan wujud perubahan yang muncul dari kebijakan, maka perlu dilakukan

Planning of change yakni perencanaan yang berkaitan dengan implementasi kebijakan untuk melakukan perubahan yang bersifat internal organisasi .

Planing for change, yakni perencanaan tentang perubahan organisasi untuk menghadapi perubahan dari luar.

2. Pendekatan prosedural/ manajerial

Pendekatan ini melihat implementasi dalam bentuk langkah-langkah yang ditempuh dalam pelaksanaan (*planning, programming, budgetting, supervision*, atau *programing, evaluation, review technique*). Yang paling penting dalam proses implementasi adalah prioritas dan tata urutan.

3. Pendekatan kewajiban / behavior

Pendekatan ini berhubungan dengan penerimaan atau penolakan masyarakat terhadap suatu kebijakan. Penerimaan masyarakat terhadap kebijakan tidak hanya ditentukan oleh isi atau substansi kebijakan, tetapi

juga oleh pendekatan dalam penyampaian dan cara mengimplementasikannya.

4. Pendekatan politik

Keberhasilan suatu kebijakan ditentukan oleh keamanan dan kemampuan dari kekuatan-kekuatan dominan dalam masyarakat atau dalam organisasi.

2.2.2 Faktor Pendukung Implementasi kebijakan

Adapun faktor faktor pendukung implementasi kebijakan publik antara lain (mengacu pada enam sumberdaya pokok manajemen menurut George R. Terry) :

1. *Men (Human Resource)*, dalam manajemen publik, sumberdaya manusia ini tidak hanya mampu, tetapi harus memenuhi persyaratan karier.
2. *Money (finance)*, dalam manajemen publik, money sangat terkait dengan ketentuan peruntukan dari mata anggaran yang telah disetujui terlebih dahulu
3. *Material (Logistik)*
4. *Machine (Information)*, manajemen publik dikelola melalui informasi yang berbentuk persuratan dan alat komunikasi lain serta dokumentasi dan arsip.
5. *Methods (legitimate)*, keabsahan atau legitimasi suatu kebijakan juga sangat penting. Dalam manajemen publik dikenal dengan persetujuan atasan atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. *Market (Participation)*, partisipasi dapat berupa dukungan dapat pula berupa penolakan. Keduanya merupakan masukan uang diperlukan

dalam proses dan implementasi kebijakan publik. Dikenal ada dua bentuk partisipasi : *pertama* murni yang muncul secara spontan dari rakyat, *kedua* mobilisasi yaitu partisipasi yang diorganisasi oleh pihak tertentu.

2.3 Kartu Keluarga Sejahtera

KKS adalah singkatan dari Kartu Keluarga Sejahtera atau juga disebutkan program Simpana Keluarga Sejahtera yang dikeluarkan oleh Pemerintahan sebagai penanda untuk keluarga yang tidak mampu, sebagai pengganti Kartu Perlindungan Sosial (KPS), yang diatur dalam intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, dan Program Indonesia Sehat untuk Membangun Keluarga Produktif. Salah satu program yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengatasi kemiskinan di Indonesia adalah Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Kartu keluarga sejahtera (KKS) menjadi media bersama dalam penyaluran berbagai bantuan seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari Kementerian Sosial, diintegrasikan penyalurannya melalui kartu KKS. Melalui pelaksanaan program, pemerintah dapat meningkatkan martabat keluarga yang kurang mampu dengan perlindungan dan pemberdayaan serta tidak sekedar diberikan bantuan dalam bentuk amal.

2.3.1 Tujuan Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)

1. Untuk mengurangi masalah kemiskinan dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin.
2. Membangun keluarga Produktif dengan memperbaiki program kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat kurang mampu. Melalui program Kartu Keluarga Sejahtera.
3. Meningkatkan maratabat keluarga kurang mampu
4. Membantu masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhannya.
5. Mencegah menurunnya taraf kesejahteraan masyarakat miskin dan rentan akibat kesulitan ekonomi.

2.3.2 Manfaat Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)

1. Perubahan perilaku pengelolaan keuangan, melalui pembukaan rekening tabungan
2. Perbaikan pendidikan generasi mendatang
3. anak usia sekolah haarus bersekolah
4. Perbaikan kualitas kesehatan
 - a. pemeriksaan kesehatan bagi ibu hamil dan balita
 - b. pemeriksaan kesehatan bagi anggota rumah tangga.
 - c. penerapan pola hidup sehat untuk usia lanjut.

2.3.3 Dasar Hukum Pelaksanaan Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010, tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.
3. Intruksi Presiden Republik Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat Untuk Membangun Keluarga Produktif.
4. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Penannggulan Kemiskinan.
5. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
6. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai.
7. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 tentang Bantuan Pengembang Sarana Usaha Melalui Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan.
8. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan.

2.3.4 Kriteria Program Kartu Keluarga Sejahtera

Perlu kita ketahui bahwa tidak semua masyarakat yang bisa mendapatkan Kartu Keluarga Sejahtera.

Berikut adalah kriteria yang harus dipenuhi, yaitu:

- 1) Warga kurang mampu berusia 22 tahun ke atas
- 2) Penyandang disabilitas yang tinggal di panti asuhan atau LKS
- 3) Lansia yang tinggal di panti asuhan atau LKS

- 4) Gelandangan dan pengemis yang tinggal di panti asuhan atau dibawah jembatan dan tidak memiliki tempat tinggal tetap atau tidak layak huni.
- 5) Korban penyalahgunaan napza yang tinggal di LKS, atau bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan.

2.4 Penelitian Terdahulu

Table 2.1 Penelitian Terdahulu

| No | Judul | Peneliti | Hasil Penelitian | Perbedaan penelitian |
|----|--|------------------------|---|---|
| 1. | Implementasi Kebijakan Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Kelurahan Sekip Jaya Kecamatan Kemuning Kota Palembang | Andela Angelini (2018) | Pelaksanaan program Kartu Keluarga Sejahtera di Kelurahan Sekip Jaya, tedapat faktor yang menjadi penghambat yaitu kurang nya sosialisasi program KKS, masih ada masyarakat miskin yang belum terdaftar, serta tidak tepat sasaran penerima KKS sehingga menimbulkan kecemburuan Sosial | <ul style="list-style-type: none"> • Lokasi penelitian • Menggunakan teori Van Meter and Van Horn sedangkan peneliti menggunakan teori Edward III |

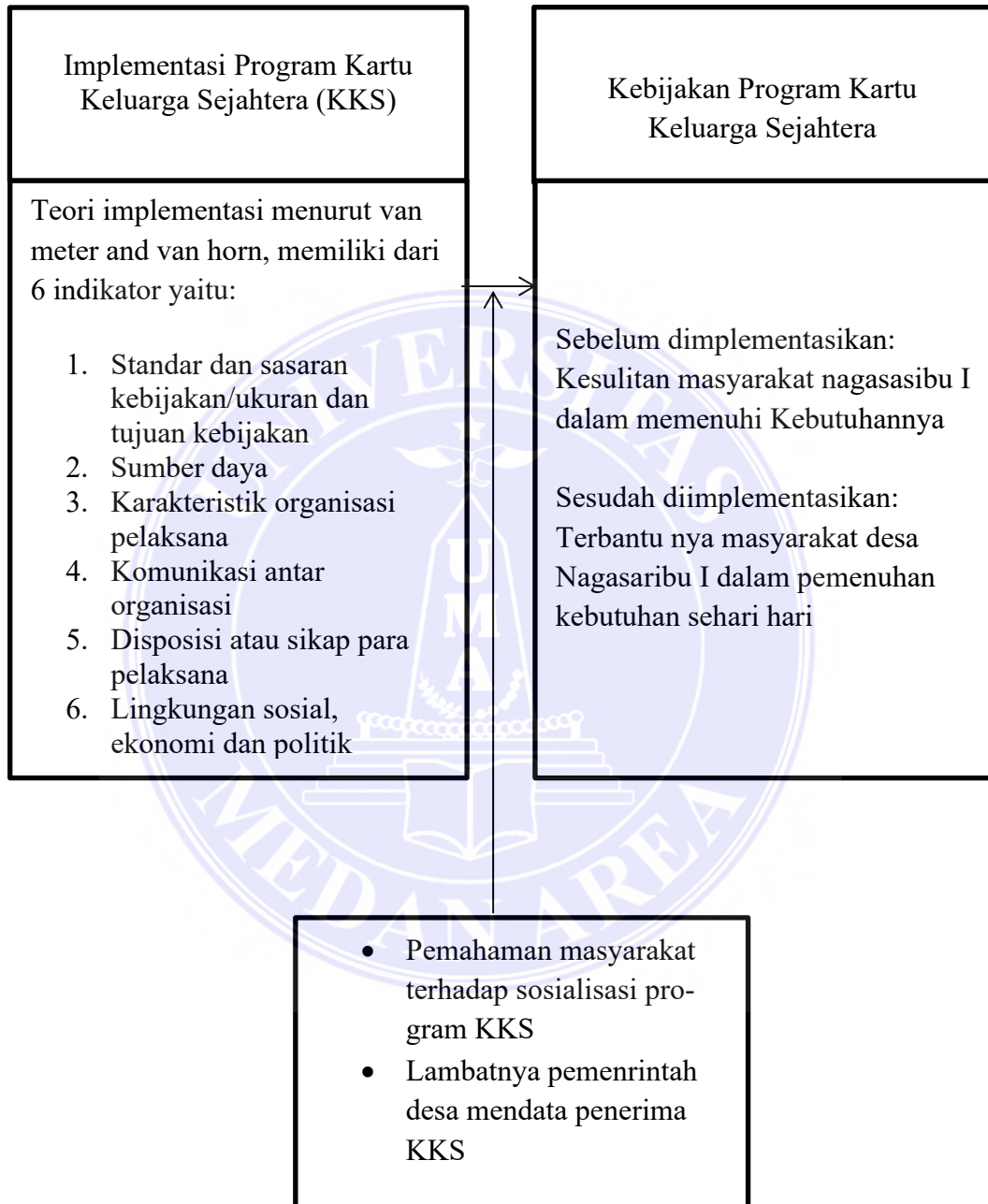
| No | Judul | Peneliti | Hasil Penelitian | Perbedaan Penelitian |
|----|--|-------------|--|---|
| 2. | Implementasi Program Kartu Keluarga Sejahtera Kabupaten Luwu | Ulfa (2020) | <p>Hasil penelitian implementasi program KKS di desa Luwu Kecamatan Bupon Kabupaten Luwu menunjukkan belum optimalnya implementasi kebijakan yang dilaksanakan, disebabkan beberapa faktor yaitu kurangnya sosialisasi dan informasi dari Aparat desa dan petugas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) kepada masyarakat mengenai program yang dikeluarkan pemerintah, pendataan dilakukan secara tertutup, dan lambannya aparat desa dalam melakukan validasi sehingga penentuan masyarakat yang menerima bantuan KKS</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Lokasi penelitian • Menggunakan teori Van Meter and Van Horn sedangkan peneliti menggunakan teori Edward III |

| No | Judul | Penulis | Hasil Penelitian | Perbedaan penelitian |
|----|--|-------------------------------------|--|---|
| 3. | Penanggulangan Kemiskinan melalui Program Kartu Keluarga Sejahtera | Sulaeman Masnan, Ahmad Nasir (2020) | Program KKS di kabupaten Sinjai telah berjalan dengan sesuai prosedur yang ditetapkan oleh Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial non Tunai dan Terkoordinasi dengan baik oleh Pemerintah desa dan seluruh element yang terlihat mulai dari tahap sosialisasi sampai proses pembagian bantuan yang dilakukan secara transparan | <ul style="list-style-type: none"> • Lokasi penelitian |

| No | Judul | Penulis | Hasil Penelitian | Perbedaan Penelitian |
|----|---|----------------------------|--|--|
| 4. | Implementasi Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi. penelitian ini mengkaji mengenai KKS di kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi | Maslina Sitanggang (2021) | Implementasi KKS di Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi menunjukkan bahwa implementasi KKS untuk mensejahterakan masyarakat desa belum optimal dilakukan, karna penetapan penerima kartu keluarga sejahteram di Kecamatan Sidikalangan tidak tepat sasaran dan tidak merata dengan baik | <ul style="list-style-type: none"> • Lokasi penelitian • Menggunakan teori Van Meter and Van Horn sedangkan peneliti menggunakan teori Edward III |
| 5. | Efektivitas Pelaksanaan Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) untuk Keluarga Miskin di Desa Sambor Raya Kecamatan Raya Kahean Kabupaten Simalungun | Khoni Asriani Purba (2022) | Hasil dari penelitian ini menunjukkan efektivitas pelaksanaan program kartu Keluarga Sejahtera di Sambosar Raya merujuk tujuan, penyaluran merata dan sesuai harapan. | <ul style="list-style-type: none"> • Lokasi penelitian • Fokus penelitian yaitu efektivitas program KKS sedangkan peneliti fokus terhadap pengimplementasian program KKS |

2.5 Kerangka Berpikir

Bagan 2.1 Kerangka Berpikir



Sumber : olahan Penulis

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Sudarwan (2003) penelitian deskriptif mengungkapkan bahwa dimaksudkan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat suatu keadaan atau wilayah populasi tertentu yang bersifat faktual. Alasan memilih metode penelitian kualitatif adalah karena data yang akan diambil dapat memberikan data yang tidak terbatas. Jadi jika data dari sumber pertama kurang lengkap maka dapat dicari lagi dari sumber data yang lainnya.

Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, maka peneliti dapat memperoleh data dan informasi yang tepat terkait dengan tujuan penelitian ini. Dimana peneliti akan mendeskripsikan upaya-upaya pemerintah dalam mengatasi kegagalan atau kendala dalam proses program tersebut dilaksanakan, peneliti juga akan mendeskripsikan faktor penghambat selama program tersebut dilaksanakan.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan berada di Desa Nagasaribu I Kecamatan Lintongnihuta Kabupaten Humbang Hasundutan. Peneliti mengambil lokasi tersebut karena di tempat tersebut permasalahan yang menarik, yakni dimana program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) tersebut menimbulkan masalah bagi para warga yang kurang mampu di desa tersebut. Dimana lambat nya

pengambilan data yang dilakukan oleh perangkat desa. Pemahaman yang kurang tentang program Kartu Keluarga Sejahtera dalam masyarakat Desa Nagasaribu I.

3.3 Waktu Penelitian

Table 3.1 waktu penelitian

| No | Uraian Kegiatan | Jan | Feb | Mart | Apr | Mei | Jun | Jul | ags |
|----|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|-----|
| | | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | |
| 1 | Penyusunan Proposal | | | | | | | | |
| 2 | Seminar Proposal | | | | | | | | |
| 3 | Perbaikan Proposal | | | | | | | | |
| 4 | Pengambilan Data Penelitian | | | | | | | | |
| 5 | Penyusunan Skripsi | | | | | | | | |
| 6 | Seminar Hasil | | | | | | | | |
| 7 | Perbaikan Skripsi | | | | | | | | |
| 8 | Sidang Meja Hijau | | | | | | | | |

3.4 Sumber Data

Informan penelitian merupakan orang yang mengetahui informasi mengenai objek yang sedang diteliti. Sumber dari penelitian ini merupakan dari hasil wawancara secara langsung yang sering disebut dengan narasumber. Dalam penelitian ini mendapatkan sumber informasi yang terdiri dari informan kunci, informan utama dan informan tambahan. Informan dalam penelitian sebagai berikut:

a. Informan kunci

Informan kunci ialah orang-orang yang mengetahui serta memahami tentang informasi penting dalam hal permasalahan serta objek yang diteliti. Yang menjadi informan kunci dalam penelitian ini ialah Kepala desa Nagasaribu I

b. Informan utama

Informan utama merupakan orang-orang yang ikut serta dan mengalami secara langsung dengan objek yang akan diteliti. Adapun Informan utama dalam penelitian ini ialah merupakan beberapa keluarga penerima bantuan Program Kartu Keluarga Sejahtera di lokasi penelitian.

c. Informan tambahan

Informan tambahan merupakan orang-orang yang benar-benar memberikan informasi maupun data meskipun mereka tidak ikut serta secara langsung dalam hal yang diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi informan tambahan ialah Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk pengumpulan data (Riduwan, 2012). Menurut Sugiyono (Sugiyono, 2018) teknik pengumpulan data merupakan langkah utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data, jika peneliti tidak mengetahui teknik pengumpulan data, peneliti tidak akan dapat memperoleh data yang sesuai. Tanpa mengetahui strategi dalam mengumpulkan

informasi, analisis tidak akan mendapatkan data yang memenuhi ukuran informasi yang ditetapkan. Untuk mendorong mendapatkan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan dengan cara sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi dapat dikatakan melakukan pengamatan dan survey secara langsung ke lokasi penelitian dalam rangka mendapatkan informasi dari suatu yang akan diteliti. Sama seperti yang dikemukakan oleh Menurut Nasution (Sugiyono, 2015) menyatakan bahwa observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Peneliti terlebih dahulu mengadakan pengamatan langsung ke lokasi penelitian yang bertempat di Desa Nagasaribu I Kecamatan Lintongnihuta Kabupaten Humbang Hasundutan.

2. Wawancara

Untuk penelitian ini menggunakan wawancara tidak terstruktur, yaitu wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan panduan wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan akurat untuk pengumpulan data wawancara tidak terstruktur akan dilakukan secara detail hingga memperoleh keterangan yang diharapkan oleh peneliti. Menurut Pasolong (Pasolong, 2013) “wawancara merupakan suatu kegiatan tanya jawab antara dua orang atau lebih secara langsung”. Namun demikian wawancara juga bisa dilakukan dengan memanfaatkan sarana komunikasi yang ada seperti telepon dan internet. Beberapa pertanyaan diajukan kepada berbagai pihak penting dan berkompeten dalam isu-isu dalam penelitian ini guna mendapatkan data yang tepat serta akurat. Pertanyaan yang ditanyakan kepada informan yang berhubungan pengalaman informan, tanggapan informan, pengetahuan informan dan

latar belakang informan yang memberikan informasi terkait dengan hal yang ingin diteliti oleh peneliti (Sugiyono, 2013).

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan mencari informasi tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan oleh sipeneliti yang terdiri dari catatan-catatan penting, transkrip, buku, dan lainnya. Dokumentasi ini menjadi bukti resmi yang harus dipertanggungjawabkan.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah metode mencari dan mengumpulkan informasi yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi secara efisien, dengan mengatur informasi ke dalam kategori, memecahnya menjadi unit-unit terpenting menjabarkan, mengaturnya ke dalam desain, memilih apa yang penting dan apa yang akan dipelajari, dan menarik kesimpulan sehingga mudah dimengerti oleh diri sendiri dan orang lain (Sugiyono, 2019).

Teknik menganalisis data deskriptif kualitatif dalam (Sugiyono, 2019) ada beberapa langkah yaitu, sebagai berikut :

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan menekan pada hal yang paling utama dari data yang sudah diambil oleh peneliti atau hal-hal yang bersifat fokus dan penting untuk dicari inti pokok atau tema dan polanya serta membuang yang tidak perlu. Dalam proses ini berlangsung pada saat pertanyaan awal dimulai sampai dengan data penelitian terkumpul.

b. Penyajian Data

Sesudah data direduksi untuk langkah berikutnya yaitu penyajian data/ mendisplaykan data yang dibuat berbentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, yang dimana memiliki tujuan untuk memudahkan serta merencanakan kerja yang akan selanjutnya dilakukan berdasarkan apa yang telah dipahami.

c. Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan atau mengambil kesimpulan adalah usaha untuk menemukan makna, serta klarifikasi yang dilakukan terhadap informasi yang dianalisis dan dengan berusaha menemukan hal-hal yang vital. Setelah informasi ditampilkan, keputusan/verifikasi akan dibuat yang membuat kesimpulan singkat yang semula kurang jelas menjadi lebih jelas dan poin demi poin, artinya meninjau ulang catatan yang diperoleh tidak valid untuk mendapatkan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa

1. Implementasi program kartu keluarga sejahtera dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari keenam indikator yang peneliti gunakan dalam penelitian ini, sudah terealisasi secara baik yaitu Standar dan Sasaran Kebijakan/ Ukuran dan Tujuan Kebijakan, Sumber Daya, Karakteristik Organisasi Pelaksana, Disposisi atau Sikap Para Pelaksana, dan Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik. namun ada satu indikator yang belum berjalan dengan baik yaitu indikator komunikasi antar organisasi.
2. Faktor-faktor penghambat dalam implementasi program kartu keluarga. Dalam pelaksanaan program kartu keluarga sejahtera terdapat beberapa kendala atau faktor penghambat. Pertama, kurangnya antusias masyarakat untuk mengikuti kegiatan sosialisasi program KKS, yang akan menyebabkan terhambatnya perangkat desa dalam pengumpulan data dikarenakan masyarakat yang tidak mengikuti sosialisasi tidak tahu data data apa saja yang harus disiapkan dan tidak tahu prosedur prosedur program KKS ini. Kedua, keterlambatan penyaluran bantuan KKS kepada masyarakat. Masalah ini menyebabkan masyarakat menjadi kecewa, dimana masyarakat sudah berharap penyaluran pada tanggal yang di

tentukan, tetapi pada saat penyaluran tidak sesuai tanggal yang ditentukan, dan tanpa konfirmasi dari pihak KKS tersebut.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas maka peneliti dapat memberikan saran dan masukan terhadap pengimplementasian program kartu keluarga sejahtera di Desa Nagasaribu I. sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa Nagasaribu I dalam memberitahu masyarakat jadwal sosialisasi yang akan dilakukan jauh jauh hari agar masyarakat desa Nagasaribu dapat membagi waktu untuk mengikuti Sosialisasi tersebut. Jika seluruh masyarakat mengikuti sosialisasi maka pemerintah desa yang bertugas mengumpulkan data penerima KKS akan lebih efektif dikarenakan masyarakat telah mengetahui prosedur program KKS ini.
2. Pemerintah desa Nagasaribu I dalam penyaluran bantuan KKS ini, memberikan konfirmasi keterlambatan kepada masyarakat, agar masyarakat tidak terlalu berharap dan agar masyarakat bisa menyediakan dana darurat jika diperlukan. Masyarakat yang menerima Bantuan Program Kartu Keluarga Sejahtera agar Tetap dalam pekerjaannya , jangan bergantung kepada bantuan sosial karena bantuan sosial yang diberikan pemerintah hanya untuk meringankan pengeluaran masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin,Said Zainal. 2004. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Yayasan Pancur Siwah
- Abidin, Said Zainal. 2006. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Suara Bebas.
- Abidin, Said Zainal. 2012. *Kebijakan Publik*. Jakarta. Penerbit Salemba Humanika
- AR, Mustopadidjaja. 2007. *Manajemen Proses Kebijakan Publik (Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kinerja)*. Jakarta: Lembaga Administrasi.
- Bogdan dan Taylor. 2012. *Prosedur Penelitian. Dalam Moleong. Pendekatan Kualitatif*. (him. 4). Jakarta: Rineka Cipta.
- Budi Winarno. 2008. *Kebijakan Publik*. Pt. Buku Kita: Jakarta
- Creswell, John W. 2012. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, and Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mazmanian, & Sabatier (2014), *Analisis Kebijakan Publik*, New York: HarperCollins
- Miles, M.B, Huberman, A.M, & Saldana, J. 2013. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3*. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
- Pasolong, Harbani. 2010. *Teori Administrasi Publik*, Alfabeta, Bandung.
- Suharno. (2013). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Kajian Proses dan Analisis Kebijakan)*. Yogyakarta: Penerbit Ombak
- Sudarwan danim. 2010 . *Perkembangan Peserta Didik*. Bandung : Alfabeta
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: CV.Alfabeta
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian dan Pengembangan (R&D)*. Bandung: Penerbit Alfabeta
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: CV.Alfabeta
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: CV.Alfabeta
- Sutrisno Hadi. 1981. *Metodolgi Reasearch jilid II*. Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM Yogyakarta.
- Wahab, Abdul Solihin. 2014. *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Wahab. 2012. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. Yogyakarta: CAPS

Winarmo, Budi. 2012. *Kebijakan Publik, Teori, Proses, Studi Edisi & Revisi Terbaru* : Yogyakarta : CAPS.

Skripsi

Anggleni, Andela. 2018. *Implementasi Kebijakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Kelurahan Sekip Jaya Kecamatan Kemuning Kota Palembang*. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara (STIA) Satya Negara Palembang

Sitanggung, Maslina. 2021. *Implementasi Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi*. Universitas

Ulfa. 2020. *Implementasi Kebijakan Program Kartu Keluarga Sejahtera Kabupaten Luwu*. institut Agama Islam Negeri Palopo

Purba, Khoni . 2022. *Efektivitas Kebijakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) untuk Keluarga Miskin di Desa Sambor Raya Kecamatan Kahean Kabupaten Simalungun*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Jurnal

Sulaeman Masnan, Ahmad Nashir .2020. *Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Kartu Keluarga Sejahtera*. Jurnal Pilar. Universitas Muhammadiyah Makassar.

Perundang-Undang

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010, tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

Intruksi Presiden Republik Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat Untuk Mem2bangun Keluarga Produktif.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Penannggulangan Kemiskinan.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016.

LAMPIRAN

Lampiran wawancara

1. Standar dan Sasaran Kebijakan

- Apa standar keberhasilan program kebijakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Desa Nagasaribu I?
- Siapa saja yang menjadi sasaran kebijakan tersebut?

2. Sumber Daya

- Apakah sumber daya manusia di Kantor Desa Nagasaribu I sudah sesuai dengan kebijakan/aturan pemerintah?
- Bagaimana kesiapan pegawai dan kompetensi dalam mengimplementasikan program KKS tersebut?

3. Hubungan Antar Organisasi

- Siapa saja yang terlibat dalam pengimplementasian kebijakan program KKS ini?
- Apakah koordinasi sudah berjalan sesuai tujuan?

4. karakteristik Agen Pelaksana

- Apakah Pemerintah Desa Nagasaribu I sudah sesuai dalam melakukan kebijakan tersebut?
- Bagaimana penyaluran bantuan kks ini di Desa Nagasaribu I ?

5. Kondisi sosial, politik dan ekonomi

- Apakah kondisi sosial, politik dan ekonomi mempengaruhi implementasi kebijakan ini?
- Bagaimana tanggapan masyarakat desa Nagasaribu I tentang program KKS?

6. disposisi para pelaksana

- Bagaimana respon Pemerintah Desa atas kebijakan program tersebut
- Bagaimana sikap Pemerintah desa dalam pelaksanaan kebijakan tersebut

Lampiran Gambar



Gambar 1. Kantor kepala desa Nagasaribu I



Gambar 2. Wawancara Bersama Kepala Desa Nagasaribu I Bapak Rickjackson Tambunan



Gambar 3. Wawancara Bersama sekretaris Desa Bapak Urat Tampubolan



Gambar 4. Wawancara Bersama Agen penyalur KKS Desa Nagasaribu I



Gambar 5. Wawancara dengan penerima Manfaat KKS